

Nama : Icha Fera Nika
NPM : 2313031065
Kelas : 2023 C
Matkul : Akuntansi Sektor Publik

Case Study 2 Pertemuan 13

Pemerintah Provinsi Nusantara menerapkan sistem *e-Government* bernama "IzinCerdas" untuk memproses seluruh jenis perizinan usaha dan bangunan secara daring. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan transparansi. Namun, laporan Ombudsman menyebutkan bahwa:

- Terjadi keterlambatan rata-rata 10 hari dalam penerbitan izin.
- Banyak izin yang tidak jelas statusnya dalam sistem.
- Ditemukan praktik penyalahgunaan wewenang meskipun sistem digital sudah diterapkan.

Pertanyaan:

Tunjukkan bagaimana Anda akan menyusun audit kinerja berbasis risiko untuk mengevaluasi sistem IzinCerdas, serta bagaimana Anda dapat menggunakan teknologi digital dalam mendeteksi potensi penyimpangan dan kelemahan sistem.

Jawaban :

Kasus keterlambatan dan penyalahgunaan wewenang dalam sistem "IzinCerdas" menunjukkan bahwa penerapan *e-Government* tidak selalu otomatis menjamin efisiensi dan transparansi. Meskipun sistem ini dirancang untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi kontak langsung antara masyarakat dan aparat, kenyataannya masih terdapat masalah seperti keterlambatan penerbitan izin, status izin yang tidak jelas, serta indikasi penyalahgunaan kewenangan. Untuk memahami dan memperbaiki kondisi ini, perlu dilakukan audit kinerja berbasis risiko yang fokus pada area dengan potensi gangguan tertinggi, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mendeteksi penyimpangan dan kelemahan sistem.

1. Penyusunan Audit Kinerja Berbasis Risiko

Audit kinerja berbasis risiko dilakukan dengan mengidentifikasi bagian-bagian dari sistem yang paling rentan terhadap kegagalan, ketidakefisienan, atau penyalahgunaan. Pendekatan ini tidak hanya menilai kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga mengevaluasi seberapa efektif sistem dalam mencapai tujuannya. Langkah-langkahnya antara lain:

a. Identifikasi Risiko Utama

Langkah awal adalah memetakan risiko yang mungkin menyebabkan rendahnya kinerja sistem “IzinCerdas”. Misalnya:

- Risiko keterlambatan proses izin akibat alur persetujuan yang belum otomatis sepenuhnya.
- Risiko data tidak sinkron atau status izin tidak jelas akibat lemahnya integrasi antar modul sistem.
- Risiko penyalahgunaan wewenang yang masih terjadi karena celah pada hak akses atau kurangnya pengawasan sistem log aktivitas.

b. Penilaian Dampak dan Probabilitas Risiko

Setiap risiko dinilai berdasarkan tingkat dampaknya terhadap pelayanan publik dan kemungkinan terjadinya. Misalnya, keterlambatan izin memiliki dampak tinggi pada kepuasan masyarakat, sedangkan penyalahgunaan wewenang berdampak besar terhadap integritas instansi.

c. Evaluasi Proses Bisnis dan Pengendalian Internal

Audit harus meninjau bagaimana sistem IzinCerdas mengatur alur kerja, siapa saja yang memiliki otoritas menyetujui izin, dan sejauh mana sistem otomatisasi bekerja. Tujuannya adalah melihat apakah proses bisnis sudah efisien dan apakah ada titik lemah dalam pengendalian yang bisa dimanfaatkan untuk penyimpangan.

d. Pengujian Kinerja Sistem dan Keandalan Data

Tahap ini mencakup pemeriksaan data transaksi, waktu proses izin, serta akurasi status dalam sistem. Auditor juga dapat membandingkan catatan digital dengan dokumen fisik untuk memastikan tidak ada data yang dimanipulasi.

e. Pelaporan dan Rekomendasi Perbaikan

Hasil audit kemudian disusun dalam bentuk laporan yang memuat temuan risiko, akar penyebab masalah, dan rekomendasi praktis untuk memperbaiki sistem, misalnya meningkatkan otomatisasi persetujuan, memperkuat pengawasan internal, atau memperjelas tanggung jawab tiap level pejabat.

2. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Deteksi Penyimpangan

Agar audit lebih efektif, teknologi digital dapat digunakan untuk membantu deteksi dini terhadap penyimpangan dan kelemahan sistem:

a. Analisis Data Transaksi (*Data Analytics*)

Menggunakan data analytics untuk menganalisis ribuan data izin yang diproses. Pola tidak wajar seperti penerbitan izin di luar jam kerja, waktu persetujuan yang terlalu cepat atau terlalu lama, dan perubahan data tanpa jejak audit dapat menjadi indikator adanya penyimpangan.

b. Pemantauan Log Aktivitas Sistem (*System Log Monitoring*)

Setiap aktivitas pengguna dalam sistem dapat terekam secara otomatis. Dengan memantau log ini, auditor dapat mengetahui siapa yang mengakses, mengubah, atau menyetujui dokumen tertentu. Pola akses yang mencurigakan bisa menjadi tanda adanya penyalahgunaan akun atau pelanggaran wewenang.

c. Dashboard Audit *Real-Time*

Membangun dashboard yang menampilkan indikator kinerja utama seperti jumlah izin yang diterbitkan, rata-rata waktu proses, dan status izin yang tertunda. Dashboard ini membantu auditor dan manajemen memantau kinerja secara langsung dan mengambil tindakan cepat jika ada anomali.

d. Penerapan Kecerdasan Buatan (*AI*) dan *Machine Learning*

AI dapat digunakan untuk mendeteksi pola penyimpangan berdasarkan data historis. Misalnya, sistem dapat memberikan peringatan otomatis bila terdapat pola perilaku pegawai atau proses perizinan yang berbeda jauh dari pola normal.